



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Mengubah yang pertama Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah

Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB II
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

10. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
11. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
12. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
14. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut aplikasi SISKEUDES, adalah alat bantu berupa perangkat lunak yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 21. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
 22. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.
 23. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat Bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat Bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Tahap III paling cepat Bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat Bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat Bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
 - (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku

KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
2. peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.

- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati atau wakil bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).

- (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 9A dan Pasal 9B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan Persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan Persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan Persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4):
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

- b. Untuk Dana Desa yang diterima dan sudah dibelanjakan sebagian, diatur dengan ketentuan:
 - 1. Dalam hal dana yang sudah dicairkan dan belum dibelanjakan, dana tersebut dapat dikembalikan ke rekening Kas Desa untuk dipergunakan sebagai BLT Desa dengan prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) baru.
 - 2. Dalam hal dana sudah disalurkan dan belum dicairkan sebagian, dana yang ada di Rekening Kas Desa dapat dipergunakan untuk BLT Desa.
- c. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan Persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana bulan pertama; dan
 - c) Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan Persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - 2. Dana Desa Tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4):
 - a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 9B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum Salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:

- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. Bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan Persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. Bulan kedua sebesar 20% (dua puluh persen), dengan Persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana bulan pertama; dan
 3. Bulan ketiga sebesar 20% (dua puluh persen), dengan Persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5):
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan
 2. Dana Dasa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana bulan pertama; dan

- c) Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - 2. Dana Desa Tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - c. Dana Desa yang diterima yang belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah mendapatkan Lembar Verifikasi Camat, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
 - 2. laporan kovergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah mendapatkan Lembar Verifikasi Camat, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (5) Bupati mendelegasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
 - (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik Dana Desa setiap minggu.
 - (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
6. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 10A dan Pasal 10B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan Persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan Persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan Persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4):
 - a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan Persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana bulan pertama; dan

- c) Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan Persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 2. Dana Desa Tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4):
 - a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 10B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum Salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. Bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan Persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. Bulan kedua sebesar 20% (dua puluh persen), dengan Persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana bulan pertama; dan
 3. Bulan ketiga sebesar 20% (dua puluh persen), dengan Persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5):

- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan Persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana bulan pertama; dan
 - c) Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan Persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 2. Dana Desa Tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
- c. Dana Desa yang diterima yang belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka

menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa:

- a. Kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
8. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu PraKerja.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap keluarga penerima manfaat setiap bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batas tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

(8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan dan keluarga manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan kepada Camat terkait Penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah Pemerintah Desa dan BPD membuat pernyataan bersama bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

11. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan;
- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa Mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II tahun anggaran berikutnya.

12. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 21A dan Pasal 21B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Kepala desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa dana desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan bupati paling lambat minggu kedua bulan oktober 2020.
- (2) Kepala desa menyetorkan sisa dana desa di RKD tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan oktober 2020.
- (3) Sisa dana desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan juli 2020.
- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa dana desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh kepala desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir Bulan November 2020.
- (5) Bupati menyetorkan sisa dana desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan desember 2020.

- (6) Dalam hal bupati tidak menyetorkan sisa dana desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan memperhitungkan sisa dana desa tersebut melalui pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran berikutnya.
- (7) Dalam hal terdapat sisa dana desa tahun anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2020, sisa dana desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran dana desa tahap II tahun anggaran 2020.
- (8) Perhitungan sisa dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 21B

Ketentuan mengenai:

- a. Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020
 - b. Format Laporan Pelaksanaan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A, Pasal 9B, Pasal 10A, dan Pasal 10B
 - c. Format Lembar Verifikasi Persyaratan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 April 2020

BUPATI NGANJUK,

Ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 30 April 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH. M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19660710 199202 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 21 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	DESA	NOMOR REKENING	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL PAGU DANA DESA AWAL	PEMOTONGAN ALOKASI DASAR	TOTAL PAGU DANA DESA PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+6+7+8)	10	11 = (9 - 10)
1	BAGOR	1 BAGORKULON	0192265215	662,806,000	0	0	332,913,000	995,719,000	10,807,000	984,912,000
		2 BALONGREJO	0192304041	662,806,000	0	0	491,993,000	1,154,799,000	10,807,000	1,143,992,000
		3 BANARANKULON	0192251150	662,806,000	0	0	547,249,000	1,210,055,000	10,807,000	1,199,248,000
		4 BANARANWETAN	0192273145	662,806,000	0	0	363,870,000	1,026,676,000	10,807,000	1,015,869,000
		5 BUDURAN	0192442966	662,806,000	0	0	218,227,000	881,033,000	10,807,000	870,226,000
		6 GANDU	0192249813	662,806,000	0	0	325,581,000	988,387,000	10,807,000	977,580,000
		7 GEMENGGENG	0192250196	662,806,000	0	0	267,950,000	930,756,000	10,807,000	919,949,000
		8 GIRIREJO	0192234506	662,806,000	0	0	300,720,000	963,526,000	10,807,000	952,719,000
		9 KARANGTENGAH	0192306019	662,806,000	0	0	176,972,000	839,778,000	10,807,000	828,971,000
		10 KENDALREJO	0192249856	662,806,000	0	0	204,384,000	867,190,000	10,807,000	856,383,000
		11 KEREPKIDUL	0192260400	662,806,000	0	0	224,366,000	887,172,000	10,807,000	876,365,000
		12 KUTUREJO	0192303974	662,806,000	0	0	192,877,000	855,683,000	10,807,000	844,876,000
		13 NGUMPUL	0192250331	662,806,000	0	0	526,376,000	1,189,182,000	10,807,000	1,178,375,000
		14 PARON	0192303991	662,806,000	0	0	217,311,000	880,117,000	10,807,000	869,310,000
		15 PESUDUKUH	0192273323	662,806,000	0	0	275,537,000	938,343,000	10,807,000	927,536,000
		16 PETAK	0192304806	662,806,000	0	0	130,005,000	792,811,000	10,807,000	782,004,000
		17 SEKARPUTIH	0192304814	662,806,000	0	0	233,429,000	896,235,000	10,807,000	885,428,000
		18 SELOREJO	0192235162	662,806,000	0	0	303,087,000	965,893,000	10,807,000	955,086,000
		19 SUGIHWARAS	0192304024	662,806,000	0	0	302,975,000	965,781,000	10,807,000	954,974,000
2	BARON	1 BARON	0192304083	662,806,000	0	144,096,000	295,907,000	1,102,809,000	10,807,000	1,092,002,000
		2 GARU	0522043290	662,806,000	0	0	325,208,000	988,014,000	10,807,000	977,207,000
		3 GEBANGKEREP	0192303851	662,806,000	0	0	272,900,000	935,706,000	10,807,000	924,899,000
		4 JAMBI	0192250722	662,806,000	0	0	275,052,000	937,858,000	10,807,000	927,051,000
		5 JEKEK	0192248787	662,806,000	0	0	595,763,000	1,258,569,000	10,807,000	1,247,762,000
		6 KATERBAN	0192304351	662,806,000	0	0	735,475,000	1,398,281,000	10,807,000	1,387,474,000
		7 KEMADUH	0192251443	662,806,000	0	0	412,410,000	1,075,216,000	10,807,000	1,064,409,000
		8 KEMLOKOLEGI	0192260582	662,806,000	0	0	349,247,000	1,012,053,000	10,807,000	1,001,246,000
		9 MABUNG	0192304253	662,806,000	0	0	553,360,000	1,216,166,000	10,807,000	1,205,359,000
		10 SAMBIROTO	0192305951	662,806,000	0	0	316,037,000	978,843,000	10,807,000	968,036,000

NO	KECAMATAN	DESA	NOMOR REKENING	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL PAGU DANA DESA AWAL	PEMOTONGAN ALOKASI DASAR	TOTAL PAGU DANA DESA PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+6+7+8)	10	11 = (9 -10)
		11 WAUNG	0522043265	662,806,000	0	0	410,081,000	1,072,887,000	10,807,000	1,062,080,000
3	BERBEK	1 BALONGREJO	0192252008	662,806,000	0	0	524,896,000	1,187,702,000	10,807,000	1,176,895,000
		2 BENDUNGREJO	0192248876	662,806,000	0	0	365,067,000	1,027,873,000	10,807,000	1,017,066,000
		3 BERBEK	0192304733	662,806,000	0	0	264,371,000	927,177,000	10,807,000	916,370,000
		4 BULU	0192248868	662,806,000	0	0	390,397,000	1,053,203,000	10,807,000	1,042,396,000
		5 CEPOKO	0192607931	662,806,000	0	0	232,035,000	894,841,000	10,807,000	884,034,000
		6 GROJOGAN	0192250986	662,806,000	0	0	319,283,000	982,089,000	10,807,000	971,282,000
		7 KACANGAN	0192304768	662,806,000	0	0	90,788,000	753,594,000	10,807,000	742,787,000
		8 MAGUAN	0192607949	662,806,000	0	0	437,823,000	1,100,629,000	10,807,000	1,089,822,000
		9 MLILIR	0192250994	662,806,000	0	0	394,945,000	1,057,751,000	10,807,000	1,046,944,000
		10 NGRAWAN	0192306060	662,806,000	0	0	260,033,000	922,839,000	10,807,000	912,032,000
		11 PATRANREJO	0192251851	662,806,000	0	0	272,677,000	935,483,000	10,807,000	924,676,000
		12 SALAMROJO	0192607957	662,806,000	0	0	472,166,000	1,134,972,000	10,807,000	1,124,165,000
		13 SEMARE	0192304750	662,806,000	0	0	177,904,000	840,710,000	10,807,000	829,903,000
		14 SENDANGBUMEN	0192248892	662,806,000	0	144,096,000	668,613,000	1,475,515,000	10,807,000	1,464,708,000
		15 SENKUT	0192305977	662,806,000	0	0	186,142,000	848,948,000	10,807,000	838,141,000
		16 SONOPATIK	0192850223	662,806,000	0	0	431,373,000	1,094,179,000	10,807,000	1,083,372,000
		17 SUMBERURIP	0192607965	662,806,000	0	0	546,510,000	1,209,316,000	10,807,000	1,198,509,000
		18 SUMBERWINDU	0192251931	662,806,000	0	144,096,000	350,162,000	1,157,064,000	10,807,000	1,146,257,000
		19 TIRIPAN	0192850215	662,806,000	0	0	252,654,000	915,460,000	10,807,000	904,653,000
4	GONDANG	1 BALONGGEBANG	0192902827	662,806,000	0	0	801,840,000	1,464,646,000	10,807,000	1,453,839,000
		2 CAMPUR	0192304113	662,806,000	0	0	656,209,000	1,319,015,000	10,807,000	1,308,208,000
		3 GONDANGKULON	0192260841	662,806,000	0	0	466,249,000	1,129,055,000	10,807,000	1,118,248,000
		4 JAAN	0192903513	662,806,000	0	0	751,131,000	1,413,937,000	10,807,000	1,403,130,000
		5 KARANGSEMI	0192248761	662,806,000	0	0	344,300,000	1,007,106,000	10,807,000	996,299,000
		6 KEDUNGLUGU	0192304008	662,806,000	0	144,096,000	209,467,000	1,016,369,000	10,807,000	1,005,562,000
		7 KETAWANG	0192251214	662,806,000	0	0	414,599,000	1,077,405,000	10,807,000	1,066,598,000
		8 LOSARI	0192226619	662,806,000	0	0	290,871,000	953,677,000	10,807,000	942,870,000
		9 MOJOSETO	0192248795	662,806,000	0	0	237,740,000	900,546,000	10,807,000	889,739,000
		10 NGLINGGO	0192250501	662,806,000	0	144,096,000	467,737,000	1,274,639,000	10,807,000	1,263,832,000
		11 NGUNJUNG	0192304393	662,806,000	0	0	323,439,000	986,245,000	10,807,000	975,438,000
		12 PANDEAN	0192242673	662,806,000	0	0	247,548,000	910,354,000	10,807,000	899,547,000
		13 SANGGRAHAN	0192902819	662,806,000	0	0	520,710,000	1,183,516,000	10,807,000	1,172,709,000
		14 SENGOWAR	0192306035	662,806,000	0	0	372,163,000	1,034,969,000	10,807,000	1,024,162,000

NO	KECAMATAN	DESA	NOMOR REKENING	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL PAGU DANA DESA AWAL	PEMOTONGAN ALOKASI DASAR	TOTAL PAGU DANA DESA PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+6+7+8)	10	11 = (9 -10)
		15 SENJAYAN	0192303940	662,806,000	0	144,096,000	198,826,000	1,005,728,000	10,807,000	994,921,000
		16 SUMBERAGUNG	0192251273	662,806,000	0	0	259,137,000	921,943,000	10,807,000	911,136,000
		17 SUMBERJO	0192224683	662,806,000	0	0	441,878,000	1,104,684,000	10,807,000	1,093,877,000
5	JATIKALEN	1 BEGENDENG	0192903173	662,806,000	0	0	304,031,000	966,837,000	10,807,000	956,030,000
		2 DAWUHAN	0522078387	662,806,000	0	0	316,615,000	979,421,000	10,807,000	968,614,000
		3 DLURUREJO	0522043320	662,806,000	0	0	232,331,000	895,137,000	10,807,000	884,330,000
		4 GONDANGWETAN	0522043311	662,806,000	0	0	399,194,000	1,062,000,000	10,807,000	1,051,193,000
		5 JATIKALEN	0522043273	662,806,000	0	0	423,357,000	1,086,163,000	10,807,000	1,075,356,000
		6 LUMPANGKUWIK	0192250137	662,806,000	0	0	260,203,000	923,009,000	10,807,000	912,202,000
		7 MUNUNG	0522043346	662,806,000	0	0	292,900,000	955,706,000	10,807,000	944,899,000
		8 NGASEM	0522083313	662,806,000	0	144,096,000	233,466,000	1,040,368,000	10,807,000	1,029,561,000
		9 PERNING	0522043281	662,806,000	0	0	356,202,000	1,019,008,000	10,807,000	1,008,201,000
		10 PULE	0522043362	662,806,000	0	0	272,592,000	935,398,000	10,807,000	924,591,000
		11 PULOWETAN	0522043222	662,806,000	0	0	300,563,000	963,369,000	10,807,000	952,562,000
6	KERTOSONO	1 BANGSRI	0192304709	662,806,000	0	0	239,534,000	902,340,000	10,807,000	891,533,000
		2 DRENGES	0192304610	662,806,000	0	0	461,270,000	1,124,076,000	10,807,000	1,113,269,000
		3 JUWONO	0522027146	662,806,000	0	0	213,050,000	875,856,000	10,807,000	865,049,000
		4 KALIANYAR	0192249881	662,806,000	0	0	135,200,000	798,006,000	10,807,000	787,199,000
		5 KEPUH	0192304628	662,806,000	0	0	188,421,000	851,227,000	10,807,000	840,420,000
		6 KUDU	0522083348	662,806,000	0	0	137,817,000	800,623,000	10,807,000	789,816,000
		7 KUTUREJO	0522043231	662,806,000	0	0	282,642,000	945,448,000	10,807,000	934,641,000
		8 LAMBANGKUNING	0192250536	662,806,000	0	0	404,775,000	1,067,581,000	10,807,000	1,056,774,000
		9 NGLAWAK	0192304377	662,806,000	0	0	229,061,000	891,867,000	10,807,000	881,060,000
		10 PANDANTOYO	0192304601	662,806,000	0	0	302,812,000	965,618,000	10,807,000	954,811,000
		11 PELEM	0192250528	662,806,000	0	0	382,265,000	1,045,071,000	10,807,000	1,034,264,000
		12 TANJUNG	0192306183	662,806,000	0	0	248,916,000	911,722,000	10,807,000	900,915,000
		13 TEMBARAK	0192306281	662,806,000	0	0	213,234,000	876,040,000	10,807,000	865,233,000
7	LENGKONG	1 BALONGASEM	0192304270	662,806,000	0	0	163,566,000	826,372,000	10,807,000	815,565,000
		2 BANGLE	0192304288	662,806,000	0	144,096,000	391,662,000	1,198,564,000	10,807,000	1,187,757,000
		3 BANJARDOWO	0192248841	662,806,000	0	0	361,881,000	1,024,687,000	10,807,000	1,013,880,000
		4 JATIPUNGGUR	0192304300	662,806,000	0	0	239,307,000	902,113,000	10,807,000	891,306,000
		5 JEGREG	0192304296	662,806,000	0	0	230,453,000	893,259,000	10,807,000	882,452,000
		6 KEDUNGMLATEN	0192248850	662,806,000	0	0	277,804,000	940,610,000	10,807,000	929,803,000
		7 KETANDAN	0192250871	662,806,000	0	0	415,316,000	1,078,122,000	10,807,000	1,067,315,000

NO	KECAMATAN	DESA	NOMOR REKENING	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL PAGU DANA DESA AWAL	PEMOTONGAN ALOKASI DASAR	TOTAL PAGU DANA DESA PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+6+7+8)	10	11 = (9 -10)
		8 LENGKONG	0192306051	662,806,000	0	0	174,852,000	837,658,000	10,807,000	826,851,000
		9 NGEPUNG	0192306078	662,806,000	0	144,096,000	402,228,000	1,209,130,000	10,807,000	1,198,323,000
		10 NGRINGIN	0192304911	662,806,000	0	0	364,180,000	1,026,986,000	10,807,000	1,016,179,000
		11 PINGGIR	0192252792	662,806,000	0	0	224,213,000	887,019,000	10,807,000	876,212,000
		12 PRAYUNGAN	0192250081	662,806,000	0	144,096,000	451,747,000	1,258,649,000	10,807,000	1,247,842,000
		13 SAWAHAN	0192304261	662,806,000	0	0	250,234,000	913,040,000	10,807,000	902,233,000
		14 SUMBERKEPUH	0192250862	662,806,000	0	144,096,000	496,879,000	1,303,781,000	10,807,000	1,292,974,000
		15 SUMBERMIRI	0522043435	662,806,000	0	144,096,000	212,643,000	1,019,545,000	10,807,000	1,008,738,000
		16 SUMBERSONO	0192306027	662,806,000	0	144,096,000	270,479,000	1,077,381,000	10,807,000	1,066,574,000
8	LOCERET	1 BAJULAN	0192251206	662,806,000	0	0	894,809,000	1,557,615,000	10,807,000	1,546,808,000
		2 CANDIREJO	0192614201	662,806,000	0	0	182,398,000	845,204,000	10,807,000	834,397,000
		3 GEJAGAN	0192303966	662,806,000	0	0	297,351,000	960,157,000	10,807,000	949,350,000
		4 GENJENG	0192272971	662,806,000	0	144,096,000	433,165,000	1,240,067,000	10,807,000	1,229,260,000
		5 GODEAN	0192260477	662,806,000	0	0	226,552,000	889,358,000	10,807,000	878,551,000
		6 JATIREJO	0192304831	662,806,000	0	0	209,066,000	871,872,000	10,807,000	861,065,000
		7 KARANGSONO	0192605466	662,806,000	0	0	367,158,000	1,029,964,000	10,807,000	1,019,157,000
		8 KENEP	0192250242	662,806,000	0	0	296,467,000	959,273,000	10,807,000	948,466,000
		9 KWAGEAN	0192304865	662,806,000	0	0	405,863,000	1,068,669,000	10,807,000	1,057,862,000
		10 LOCERET	0192304784	662,806,000	0	0	150,847,000	813,653,000	10,807,000	802,846,000
		11 MACANAN	0192260396	662,806,000	0	0	1,091,144,000	1,753,950,000	10,807,000	1,743,143,000
		12 MUNGKUNG	0192260426	662,806,000	0	0	300,181,000	962,987,000	10,807,000	952,180,000
		13 NGEPEH	0192306311	662,806,000	0	0	868,885,000	1,531,691,000	10,807,000	1,520,884,000
		14 NGLABAN	0192303931	662,806,000	0	0	589,816,000	1,252,622,000	10,807,000	1,241,815,000
		15 PATIHAN	0192249821	662,806,000	0	0	287,475,000	950,281,000	10,807,000	939,474,000
		16 PUTUKREJO	0192249848	662,806,000	0	0	469,678,000	1,132,484,000	10,807,000	1,121,677,000
		17 SEKARAN	0192249830	662,806,000	0	0	385,654,000	1,048,460,000	10,807,000	1,037,653,000
		18 SOMBRON	0192251125	662,806,000	0	0	206,501,000	869,307,000	10,807,000	858,500,000
		19 SUKOREJO	0192250765	662,806,000	0	0	263,052,000	925,858,000	10,807,000	915,051,000
		20 TANJUNGREJO	0192304121	662,806,000	0	144,096,000	375,248,000	1,182,150,000	10,807,000	1,171,343,000
		21 TEKENGLAGAHAN	0192303796	662,806,000	0	0	279,980,000	942,786,000	10,807,000	931,979,000
		22 TEMPELWETAN	0192304822	662,806,000	0	0	170,917,000	833,723,000	10,807,000	822,916,000
9	NGANJUK	1 BALONGPACUL	0192303958	662,806,000	0	0	277,057,000	939,863,000	10,807,000	929,056,000
		2 KEDUNGOWO	0192304091	662,806,000	0	0	431,559,000	1,094,365,000	10,807,000	1,083,558,000
10	NGETOS	1 BLONGKO	0192608201	662,806,000	0	0	830,493,000	1,493,299,000	10,807,000	1,482,492,000

NO	KECAMATAN	DESA	NOMOR REKENING	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL PAGU DANA DESA AWAL	PEMOTONGAN ALOKASI DASAR	TOTAL PAGU DANA DESA PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+6+7+8)	10	11 = (9 -10)
		2 KEPEL	0192250463	662,806,000	0	0	1,006,490,000	1,669,296,000	10,807,000	1,658,489,000
		3 KLODAN	0192608198	662,806,000	0	0	697,355,000	1,360,161,000	10,807,000	1,349,354,000
		4 KUNCIR	0192605563	662,806,000	0	0	364,017,000	1,026,823,000	10,807,000	1,016,016,000
		5 KWEDEN	0192250731	662,806,000	0	0	270,311,000	933,117,000	10,807,000	922,310,000
		6 MOJODUWUR	0192605911	662,806,000	0	0	871,560,000	1,534,366,000	10,807,000	1,523,559,000
		7 NGETOS	0192604338	662,806,000	0	0	937,824,000	1,600,630,000	10,807,000	1,589,823,000
		8 ORO-OROOMBO	0192605555	662,806,000	0	0	292,924,000	955,730,000	10,807,000	944,923,000
		9 SURU	0902003967	662,806,000	0	0	540,822,000	1,203,628,000	10,807,000	1,192,821,000
11	NGLUYU	1 BAJANG	0192248825	662,806,000	0	0	599,569,000	1,262,375,000	10,807,000	1,251,568,000
		2 GAMPENG	0192303877	662,806,000	0	0	492,249,000	1,155,055,000	10,807,000	1,144,248,000
		3 LENGKONGLOR	0192306264	662,806,000	0	0	406,947,000	1,069,753,000	10,807,000	1,058,946,000
		4 NGLUYU	0192303893	662,806,000	0	0	287,179,000	949,985,000	10,807,000	939,178,000
		5 SUGIHWARAS	0192248833	662,806,000	0	0	408,391,000	1,071,197,000	10,807,000	1,060,390,000
		6 TEMPURAN	0192248809	662,806,000	0	0	336,829,000	999,635,000	10,807,000	988,828,000
12	NGRONGGOT	1 BANJARSARI	0192253985	662,806,000	0	0	671,884,000	1,334,690,000	10,807,000	1,323,883,000
		2 BETET	0192249911	662,806,000	0	0	397,317,000	1,060,123,000	10,807,000	1,049,316,000
		3 CENGGOK	0192304644	662,806,000	0	0	1,117,264,000	1,780,070,000	10,807,000	1,769,263,000
		4 DADAPAN	0192250854	662,806,000	0	0	624,268,000	1,287,074,000	10,807,000	1,276,267,000
		5 JUWET	0192250129	662,806,000	0	0	538,225,000	1,201,031,000	10,807,000	1,190,224,000
		6 KALIANYAR	0192251061	662,806,000	0	0	392,142,000	1,054,948,000	10,807,000	1,044,141,000
		7 KALORAN	0192306108	662,806,000	0	0	466,209,000	1,129,015,000	10,807,000	1,118,208,000
		8 KELUTAN	0192250102	662,806,000	0	0	325,730,000	988,536,000	10,807,000	977,729,000
		9 KLURAHAN	0192250226	662,806,000	0	0	768,002,000	1,430,808,000	10,807,000	1,420,001,000
		10 MOJOKENDIL	0192303915	662,806,000	0	0	908,661,000	1,571,467,000	10,807,000	1,560,660,000
		11 NGRONGGOT	0192304369	662,806,000	0	0	1,050,827,000	1,713,633,000	10,807,000	1,702,826,000
		12 TANJUNGKALANG	0192306094	662,806,000	0	0	853,543,000	1,516,349,000	10,807,000	1,505,542,000
		13 TRAYANG	0192266084	662,806,000	0	0	361,184,000	1,023,990,000	10,807,000	1,013,183,000
13	PACE	1 BABADAN	0192273099	662,806,000	0	0	426,475,000	1,089,281,000	10,807,000	1,078,474,000
		2 BANARAN	0192303834	662,806,000	0	0	317,367,000	980,173,000	10,807,000	969,366,000
		3 BATEMBAT	0192604125	662,806,000	0	0	224,193,000	886,999,000	10,807,000	876,192,000
		4 BODOR	0192250951	662,806,000	0	0	218,659,000	881,465,000	10,807,000	870,658,000
		5 CERME	0192250099	662,806,000	0	0	185,720,000	848,526,000	10,807,000	837,719,000
		6 GEMENGGENG	0192304636	662,806,000	0	0	329,732,000	992,538,000	10,807,000	981,731,000
		7 GONDANG	0192271541	662,806,000	0	0	383,516,000	1,046,322,000	10,807,000	1,035,515,000

NO	KECAMATAN	DESA	NOMOR REKENING	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL PAGU DANA DESA AWAL	PEMOTONGAN ALOKASI DASAR	TOTAL PAGU DANA DESA PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+6+7+8)	10	11 = (9 -10)
		8 JAMPES	0192304652	662,806,000	0	0	338,949,000	1,001,755,000	10,807,000	990,948,000
		9 JATIGREGES	0192304661	662,806,000	0	0	304,986,000	967,792,000	10,807,000	956,985,000
		10 JETIS	0192303826	662,806,000	0	0	370,270,000	1,033,076,000	10,807,000	1,022,269,000
		11 JOHO	0192250889	662,806,000	0	0	729,318,000	1,392,124,000	10,807,000	1,381,317,000
		12 KECUBUNG	0192304687	662,806,000	0	0	314,015,000	976,821,000	10,807,000	966,014,000
		13 KEPANJEN	0192304679	662,806,000	0	0	379,038,000	1,041,844,000	10,807,000	1,031,037,000
		14 MLANDANGAN	0192249953	662,806,000	0	0	396,866,000	1,059,672,000	10,807,000	1,048,865,000
		15 PACEKULON	0192604290	662,806,000	0	0	363,230,000	1,026,036,000	10,807,000	1,015,229,000
		16 PACEWETAN	0192604192	662,806,000	0	0	468,137,000	1,130,943,000	10,807,000	1,120,136,000
		17 PLOSOHARJO	0192250005	662,806,000	0	0	493,999,000	1,156,805,000	10,807,000	1,145,998,000
		18 SANAN	0192607981	662,806,000	0	0	311,299,000	974,105,000	10,807,000	963,298,000
14	PATIANROWO	1 BABADAN	0192250021	662,806,000	0	144,096,000	696,460,000	1,503,362,000	10,807,000	1,492,555,000
		2 BUKUR	0192304181	662,806,000	0	0	530,961,000	1,193,767,000	10,807,000	1,182,960,000
		3 LESTARI	0192304407	662,806,000	0	0	155,272,000	818,078,000	10,807,000	807,271,000
		4 NGEPUNG	0192304385	662,806,000	0	0	681,953,000	1,344,759,000	10,807,000	1,333,952,000
		5 NGROMBOT	0192250030	662,806,000	0	0	194,035,000	856,841,000	10,807,000	846,034,000
		6 PAKUNCEN	0192260418	662,806,000	0	144,096,000	120,377,000	927,279,000	10,807,000	916,472,000
		7 PATIANROWO	0192304199	662,806,000	0	0	153,164,000	815,970,000	10,807,000	805,163,000
		8 PECUK	0192306043	662,806,000	0	0	329,384,000	992,190,000	10,807,000	981,383,000
		9 PISANG	0192250072	662,806,000	0	0	317,605,000	980,411,000	10,807,000	969,604,000
		10 ROWOMARTO	0192304202	662,806,000	0	144,096,000	583,123,000	1,390,025,000	10,807,000	1,379,218,000
		11 TIRTOBINANGUN	0192252083	662,806,000	0	144,096,000	459,184,000	1,266,086,000	10,807,000	1,255,279,000
15	PRAMBON	1 BALETURI	0192235448	662,806,000	0	0	625,910,000	1,288,716,000	10,807,000	1,277,909,000
		2 BANDUNG	0192265711	662,806,000	0	0	322,492,000	985,298,000	10,807,000	974,491,000
		3 GONDANGLEGI	0192304211	662,806,000	0	144,096,000	589,139,000	1,396,041,000	10,807,000	1,385,234,000
		4 KURUNGREJO	0192304245	662,806,000	0	0	440,766,000	1,103,572,000	10,807,000	1,092,765,000
		5 MOJOAGUNG	0192507961	662,806,000	0	0	394,994,000	1,057,800,000	10,807,000	1,046,993,000
		6 NGLAWAK	0192507758	662,806,000	0	0	271,275,000	934,081,000	10,807,000	923,274,000
		7 ROWOHARJO	0192250510	662,806,000	0	0	472,849,000	1,135,655,000	10,807,000	1,124,848,000
		8 SANGGRAHAN	0192250111	662,806,000	0	0	350,300,000	1,013,106,000	10,807,000	1,002,299,000
		9 SINGKALANYAR	0192304172	662,806,000	0	0	404,926,000	1,067,732,000	10,807,000	1,056,925,000
		10 SONOAGENG	0192250790	662,806,000	0	0	718,651,000	1,381,457,000	10,807,000	1,370,650,000
		11 SUGIHWARAS	0192304156	662,806,000	0	0	711,977,000	1,374,783,000	10,807,000	1,363,976,000
		12 TANJUNGTANI	0192304148	662,806,000	0	0	685,280,000	1,348,086,000	10,807,000	1,337,279,000

NO	KECAMATAN	DESA	NOMOR REKENING	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL PAGU DANA DESA AWAL	PEMOTONGAN ALOKASI DASAR	TOTAL PAGU DANA DESA PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+6+7+8)	10	11 = (9 -10)
		13 TEGARON	0192507693	662,806,000	0	0	281,601,000	944,407,000	10,807,000	933,600,000
		14 WATUDANDANG	0192507987	662,806,000	0	0	554,616,000	1,217,422,000	10,807,000	1,206,615,000
16	REJOSO	1 BANJAREJO	0192253888	662,806,000	0	0	249,627,000	912,433,000	10,807,000	901,626,000
		2 BENDOASRI	0192248779	662,806,000	0	0	241,860,000	904,666,000	10,807,000	893,859,000
		3 GEMPOL	0192252199	662,806,000	0	0	262,358,000	925,164,000	10,807,000	914,357,000
		4 JATIREJO	0192271207	662,806,000	0	0	226,310,000	889,116,000	10,807,000	878,309,000
		5 JINTEL	0192252202	662,806,000	0	0	253,450,000	916,256,000	10,807,000	905,449,000
		6 KEDUNGPADANG	0192303818	662,806,000	0	0	265,847,000	928,653,000	10,807,000	917,846,000
		7 KLAGEN	0192252237	662,806,000	0	0	357,634,000	1,020,440,000	10,807,000	1,009,633,000
		8 MLORAH	0192304130	662,806,000	0	0	602,403,000	1,265,209,000	10,807,000	1,254,402,000
		9 MOJOREMBUN	0192304431	662,806,000	0	0	451,041,000	1,113,847,000	10,807,000	1,103,040,000
		10 MUNGKUNG	0192251605	662,806,000	0	0	262,359,000	925,165,000	10,807,000	914,358,000
		11 MUSIRKIDUL	0192253993	662,806,000	0	0	468,970,000	1,131,776,000	10,807,000	1,120,969,000
		12 MUSIRLOR	0192306302	662,806,000	0	0	450,820,000	1,113,626,000	10,807,000	1,102,819,000
		13 NGADIBOYO	0192234751	662,806,000	0	0	874,427,000	1,537,233,000	10,807,000	1,526,426,000
		14 NGANGKATAN	0192253934	662,806,000	0	0	423,679,000	1,086,485,000	10,807,000	1,075,678,000
		15 PUHKEREP	0192273013	662,806,000	0	0	612,589,000	1,275,395,000	10,807,000	1,264,588,000
		16 REJOSO	0192249937	662,806,000	0	0	278,468,000	941,274,000	10,807,000	930,467,000
		17 SAMBIKEREP	0192306248	662,806,000	0	0	457,563,000	1,120,369,000	10,807,000	1,109,562,000
		18 SETREN	0192248736	662,806,000	0	0	269,331,000	932,137,000	10,807,000	921,330,000
		19 SIDOKARE	0192252903	662,806,000	0	0	245,630,000	908,436,000	10,807,000	897,629,000
		20 SUKOREJO	0192249996	662,806,000	0	0	223,561,000	886,367,000	10,807,000	875,560,000
		21 TALANG	0192304580	662,806,000	0	0	136,170,000	798,976,000	10,807,000	788,169,000
		22 TALUN	0192303907	662,806,000	0	0	217,479,000	880,285,000	10,807,000	869,478,000
		23 TRITIK	0192250749	662,806,000	0	0	258,550,000	921,356,000	10,807,000	910,549,000
		24 WENGKAL	0192251401	662,806,000	0	0	343,261,000	1,006,067,000	10,807,000	995,260,000
17	SAWAHAN	1 BARENG	0192608007	662,806,000	0	0	808,880,000	1,471,686,000	10,807,000	1,460,879,000
		2 BENDOLO	0192251761	662,806,000	0	0	580,590,000	1,243,396,000	10,807,000	1,232,589,000
		3 DUREN	0192305985	662,806,000	0	144,096,000	1,097,472,000	1,904,374,000	10,807,000	1,893,567,000
		4 KEBONAGUNG	0192248817	662,806,000	0	0	685,160,000	1,347,966,000	10,807,000	1,337,159,000
		5 MARGOPATUT	0192614066	662,806,000	0	0	1,478,089,000	2,140,895,000	10,807,000	2,130,088,000
		6 NGLIMAN	0192304075	662,806,000	0	144,096,000	809,150,000	1,616,052,000	10,807,000	1,605,245,000
		7 SAWAHAN	0192306001	662,806,000	0	0	477,079,000	1,139,885,000	10,807,000	1,129,078,000
		8 SIDOREJO	0192305993	662,806,000	0	0	281,364,000	944,170,000	10,807,000	933,363,000

NO	KECAMATAN	DESA	NOMOR REKENING	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL PAGU DANA DESA AWAL	PEMOTONGAN ALOKASI DASAR	TOTAL PAGU DANA DESA PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+6+7+8)	10	11 = (9 -10)
		9 SIWALAN	0192304032	662,806,000	0	144,096,000	223,293,000	1,030,195,000	10,807,000	1,019,388,000
18	SUKOMORO	1 BAGORWETAN	0192224454	662,806,000	0	0	583,988,000	1,246,794,000	10,807,000	1,235,987,000
		2 BLITARAN	0192224403	662,806,000	0	0	418,354,000	1,081,160,000	10,807,000	1,070,353,000
		3 BUNGUR	0192224446	662,806,000	0	0	378,594,000	1,041,400,000	10,807,000	1,030,593,000
		4 KEDUNGSOKO	0192224411	662,806,000	0	0	268,736,000	931,542,000	10,807,000	920,735,000
		5 NGLUDO	0192226627	662,806,000	0	0	322,391,000	985,197,000	10,807,000	974,390,000
		6 NGRAMI	0192224390	662,806,000	0	0	527,287,000	1,190,093,000	10,807,000	1,179,286,000
		7 NGRENGKET	0192224420	662,806,000	0	0	283,337,000	946,143,000	10,807,000	935,336,000
		8 PEHSERUT	0192260876	662,806,000	0	144,096,000	341,085,000	1,147,987,000	10,807,000	1,137,180,000
		9 PUTREN	0192306426	662,806,000	0	0	511,686,000	1,174,492,000	10,807,000	1,163,685,000
		10 SUMENGKO	0192224471	662,806,000	0	0	711,708,000	1,374,514,000	10,807,000	1,363,707,000
19	TANJUNGANOM	1 BANJARANYAR	0192304938	662,806,000	0	0	659,970,000	1,322,776,000	10,807,000	1,311,969,000
		2 DEMANGAN	0192304695	662,806,000	0	0	509,525,000	1,172,331,000	10,807,000	1,161,524,000
		3 GETAS	0192250773	662,806,000	0	0	557,498,000	1,220,304,000	10,807,000	1,209,497,000
		4 JOGOMERTO	0192196728	662,806,000	0	0	435,924,000	1,098,730,000	10,807,000	1,087,923,000
		5 KAMPUNGBARU	0192306388	662,806,000	0	0	692,290,000	1,355,096,000	10,807,000	1,344,289,000
		6 KEDUNGOMBO	0192250781	662,806,000	0	0	711,933,000	1,374,739,000	10,807,000	1,363,932,000
		7 KEDUNGREJO	0192304849	662,806,000	0	0	552,024,000	1,214,830,000	10,807,000	1,204,023,000
		8 MALANGSARI	0192304792	662,806,000	0	0	176,706,000	839,512,000	10,807,000	828,705,000
		9 NGADIREJO	0192266475	662,806,000	0	0	452,127,000	1,114,933,000	10,807,000	1,104,126,000
		10 SAMBIREJO	0192304776	662,806,000	0	0	407,620,000	1,070,426,000	10,807,000	1,059,619,000
		11 SIDOHARJO	0192705606	662,806,000	0	0	598,163,000	1,260,969,000	10,807,000	1,250,162,000
		12 SONOBEKEL	0192198496	662,806,000	0	0	529,900,000	1,192,706,000	10,807,000	1,181,899,000
		13 SUMBERKEPUH	0192304067	662,806,000	0	0	1,070,448,000	1,733,254,000	10,807,000	1,722,447,000
		14 WATES	0192175739	662,806,000	0	0	245,200,000	908,006,000	10,807,000	897,199,000
20	WILANGAN	1 MANCON	0192250846	662,806,000	0	144,096,000	430,062,000	1,236,964,000	10,807,000	1,226,157,000
		2 NGADIPIRO	0192251354	662,806,000	0	0	255,285,000	918,091,000	10,807,000	907,284,000
		3 NGUDIKAN	0192250943	662,806,000	0	0	334,576,000	997,382,000	10,807,000	986,575,000
		4 SUDIMOROHARJO	0192304229	662,806,000	0	144,096,000	1,003,092,000	1,809,994,000	10,807,000	1,799,187,000
		5 SUKOHARJO	0192250935	662,806,000	0	0	470,168,000	1,132,974,000	10,807,000	1,122,167,000
		6 WILANGAN	0192250803	662,806,000	0	0	336,889,000	999,695,000	10,807,000	988,888,000
JUMLAH				174,980,784,000	0	3,746,496,000	109,108,972,000	287,836,252,000	2,853,048,000	284,983,204,000

NO	KECAMATAN	DESA	NOMOR REKENING	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL PAGU DANA DESA AWAL	PEMOTONGAN ALOKASI DASAR	TOTAL PAGU DANA DESA PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+6+7+8)	10	11 = (9 -10)

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH. M.Si
NIP. 19660710 199202 1 001

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 21 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN NGANJUK

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN Rp	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/ CAP JEMPOL	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
1					1	2
2						
3					3	4
4						
5					5	6
6						
7					7	8
8						
9					9	10
10						
11					11	12
12						
13					13	14
14						

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN Rp	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/ CAP JEMPOL	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
15					15	16
16						
17					17	18
18						
19					19	20
20						
21					21	22
22						
23					23	24
24						

Telah diverifikasi oleh
Sekretaris Desa

(.....)

Yang Membayar
Kaur/ Kasi (PKA)

(.....)

Mengetahui
Kepala Desa

(.....)

BUPATI NGANJUK,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ttd

ANANG TRIYANTO, SH. M.Si
NIP. 19660710 199202 1 001

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 21 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
 DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT

LEMBAR VERIFIKASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN NGANJUK

Tanggal Verifikasi :, 20...

NO	URAIAN	KELENGKAPAN	
		Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat
1	Tahap I		
	- Peraturan Desa mengenai APBDes		
2	Tahap II		
	- Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran Sebelumnya		
3	Tahap III		
	- Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen)		
	- Laporan Kovergensi Pencegahan Stunting Tingkat Desa Tahun Anggaran Sebelumnya		
	- Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa		

Catatan Hasil Verifikasi :

.....

Telah diverifikasi oleh
 Camat

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI NGANJUK,

ttd.

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH. M.Si
 NIP. 19660710 199202 1 001

NOVI RAHMAN HIDHAYAT